

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi keamanan maritim Indonesia di dalam menghadapi ancaman menerapkan dua pendekatan, yakni *modern* dan *post modern navy*. Pendekatan *modern navy* dimaksudkan untuk mempersiapkan kapabilitas armada tempur laut demi menjalankan *sea control & sea denial* serta menghadapi kemungkinan terburuk yakni pertempuran. Indonesia juga memahami bahwa demi mengamankan perairannya tidak cukup hanya mengandalkan kemampuannya sendiri sehingga diperlukan adanya kolaborasi dengan negara tetangga yang masuk ke dalam pendekatan *post modern navy*. Bentuk kolaborasi tersebut adalah dengan menggunakan instrumen *ASEAN Outlook On The Indo-Pacific* melalui latihan ASEX-01 N. Ringkasnya Indonesia menerapkan strategi yang tidak kaku dengan dibuktikan melalui dua pendekatan tersebut.

Strategi keamanan maritim Indonesia untuk menghadapi ancaman permukaan laut mengalami perkembangan ke arah yang positif. Hal ini dibuktikan dengan adanya kiat dari Indonesia untuk mencoba mandiri secara bertahap di dalam membangun kekuatan alutsista kapal perang demi menjaga perairannya. Indonesia menerapkan strategi *emulation* atau *transfer of technology* dari hasil kontrak pengadaan di dalam upaya kemandirian membangun kapal perang secara mandiri. Strategi tersebut sekaligus mengindikasikan adanya titik terang atas permasalahan yang selama ini dihadapi, yakni jumlah kapal perang dalam mengamankan perairan dari ancaman tidak sesuai dengan luasnya perairan Indonesia. Saat ini (tahun 2024)

jumlah armada kapal perang yang dimiliki oleh Indonesia menunjukkan adanya arah peningkatan. Hal ini pertanda baik karena dengan adanya peningkatan, maka proses operasional pengamanan maritim dapat terlaksana dengan lebih baik.

Kendati demikian, hasil penelitian dari aspek lain menunjukan bahwa strategi keamanan maritim yang diterapkan oleh Indonesia belum mencapai level optimal. Belum optimalnya strategi Indonesia dilihat dari aspek kesiapan pengamanan bawah laut. Hasil dari analisis membuktikan, Indonesia kurang di dalam menaruh perhatian atas pembangunan keamanan bawah lautnya. Ditemukannya *seaglider* sebanyak tiga kali di perairan Indonesia membuktikan hal tersebut. Kasus penemuan tersebut bisa terjadi karena fokus pada desain pertahanan masih belum mengikuti kecenderungan ancaman secara keseluruhan, ditambah lagi terdapat ketimpangan teknologi yang terjadi sebagai akibat dari *relative distribution of power* pada kawasan Indo-Pasifik. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai contoh telah mengembangkan teknologi tinggi di dalam strategi maritim demi kepentingannya, yakni mengoperasikan *drone*. Perkembangan teknologi yang sangat cepat tersebut mengarahkan Indo-Pasifik menjadi kawasan '*dronifikasi*'. Di sisi lain Indonesia belum mempunyai sistem yang mendeteksi keamanan bawah laut. Jadi pada intinya Indonesia terkesan kurang menaruh perhatian lebih dalam terhadap pembangunan sistem deteksi keamanan bawah lautnya.

Cara dan dasar pandang Indonesia sebagai kekuatan nasional sejatinya telah memberikan penekanan terhadap pentingnya menjaga keamanan maritimnya. Pancasila sebagai *philosophische grondslag*, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara

baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan tanggung jawab termasuk kepada negara untuk menjaga kekayaan yang dimiliki. Akan tetapi penerjemahannya ke dalam desain pertahanan maritim belum menunjukkan arah adaptif secara sepenuhnya. Perkembangan dinamika di Indo-Pasifik yang mengarah kepada '*dronifikasi*' dan tidak adanya alat deteksi bawah laut menunjukkan adanya pola kebijakan yang harus dibenahi. Pola pengambilan kebijakan di tingkat Kemhan RI harus lebih mempertimbangkan kebutuhan masing-masing angkatan termasuk TNI AL. Hal tersebut diperkuat dengan kritik Laksamana TNI (Purn.) Bernard Kent Sondakh yang mengkritisi pola kebijakan *top down* di dalam pengadaan alutsista. Artinya sistem pengadaan alutsista harus mempertimbangkan kecenderungan ancaman yang terjadi di wilayah sekitar, dalam hal ini Indo-Pasifik. Pendek kata, beberapa strategi keamanan maritim Indonesia di dalam sistem pengamanan bawah laut belum selaras dengan cara dan dasar pandang yang dimiliki Indonesia secara keseluruhan.

Hasil analisis lain menunjukkan bahwa tidak adanya alat deteksi bawah laut memberikan pengaruh terhadap operasionalisasi Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN). Strategi operasional tersebut telah menyediakan konsep *sea control & Sea denial*, akan tetapi implementasinya masih terbatas jika dihadapkan dalam perkembangan dinamika yang terjadi. SPLN yang ditujukan sebagai upaya di dalam *working control* (intensitas gangguan musuh rendah) namun jika diamati dengan kualitas sistem pendeteksi khususnya pengamanan bawah laut, maka strategi tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan kontemporer Indo-Pasifik. Dengan kata lain sistem pertahanan berlapis tersebut yang mencegah

musuh atau lawan untuk masuk ke yurisdiksi perairan Indonesia belum sepenuhnya berjalan pada sistem pengamanan bawah laut.

Jadi penelitian ini menemukan bahwa strategi keamanan maritim Indonesia di dalam pembangunan Poros Maritim Dunia (PMD) dapat lebih dioptimalkan dengan cara meningkatkan desain pertahanannya. Konstruksi penguatan keamanan laut melalui perencanaan pengadaan alutsista, dan pengamanan bawah laut masih perlu dioptimalkan yang tentunya sesuai dengan kerangka pembangunan PMD sebagai kepentingan nasional. Hal ini dikarenakan, salah satu aspek di dalam PMD sebagai *fulcrume* menurut Andi Widjajanto dan Rizal Sukma adalah melakukan proyeksi kekuatan TNI AL yang disegani di kawasan. Terlebih lagi Indonesia bercita-cita memiliki kekuatan yang mengarungi dua samudera sebagaimana dikatakan Presiden Jokowi pada tahun 2014. Maka dari itu, desain pertahanan melalui perencanaan alutsista, doktrin, dan juga tujuan atau kepentingan nasional harus memiliki pola yang terstruktur.

4.2 Saran

Penelitian ini membahas mengenai peninjauan strategi keamanan maritim Indonesia berdasarkan orientasi pertahanan dalam kerangka Poros Maritim Dunia. Dalam hal ini, penulis memfokuskan antara cara pandang Indonesia, tujuan nasional dalam bidang maritim melalui nawacita PMD dengan strategi yang diterapkan. Akan tetapi penelitian ini tidak menjelaskan perbandingan strategi Indonesia dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, perbedaan antara strategi keamanan

maritim Indonesia dengan negara-negara lain menjadi rekomendasi untuk peneliti selanjutnya.

Penelitian ini juga memberikan saran praktis kepada Kementerian Pertahanan RI dan *coast guard* Indonesia. Kementerian Pertahanan RI harus lebih meningkatkan desain pertahanannya sesuai dengan nawacita pada pembangunan Poros Maritim Dunia dengan pertimbangan kecenderungan ancaman dinamika yang terjadi di Indo-Pasifik. Seperti contohnya membangun sistem pertahanan bawah laut. Indonesia harus memperbaiki status hukum Kementerian atau Lembaga yang memiliki kewenangan di dalam melaksanakan keamanan maritim. Status hukum *coast guards* harus terus menjadi prioritas pembenahan agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.